

## PERBANKAN BTN Perbanyak Bank Mini

MELIHAT manfaat dan pentingnya tabungan bagi pelajar, khususnya untuk rencana pendidikan dan masa depan mereka, Bank Tabungan Negara (BTN) merambah dunia pendidikan untuk mengajak pelajar giat menabung. Melalui kerjasama dengan SMP Gema 45, BTN memfasilitasi dan memberikan pembinaan terhadap dibukanya bank mini di sekolah tersebut. Dari sana diharapkan kesadaran akan menabung pelajar meningkat dan berkontribusi dalam jumlah nasabah BTN.

"Kesadaran menabung yang mulai berkurang dan terbatasnya fasilitas untuk melakukan transaksi menabung, membuat kami ingin mendekati diri dengan pelajar. Kami ajak mereka kembali memulai kebiasaan baik tersebut. Sekaligus untuk promosi produk-produk kami yang dikhususkan bagi pelajar," papar Heru Triharto, Kepala Cabang BTN Surabaya Barat, Rabu (16/5).

Selain menasar pelajar, BTN juga memanfaatkan momen tersebut untuk menjangkau kalangan yang lebih luas dari yayasan di lembaga pendidikan tersebut. "Selain pelajarnya, di sini kami juga menasar beberapa lembaga yang ada dalam naungan yayasan ini. Jadi, dalam satu momen kami bisa memanfaatkannya untuk memberikan penawaran bagi beberapa segmen," jelas Heru.

Dari pembukaan bank mini di SMP Gema 45 dan kerjasama dengan Yayasan Perjuangan 45, BTN menargetkan ada Rp 5 miliar dana yang mengendap dari beberapa produk, penawaran dan transaksi yang ada. Selain itu, diharapkan akan ada omzet sebesar Rp 500 juta dari transaksi yang terjadi di sana. "Itu target kami sementara dari kerjasama ini. Kami harapkan ke depannya akan menjalin kerjasama dengan banyak lembaga pendidikan," terang Heru.

Heru menambahkan, sampai akhir tahun nanti BTN Surabaya Barat menargetkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 335 miliar. Sementara hingga kuartal I/2012, penghimpunan DPK mencapai Rp 192 miliar. Sedangkan untuk kredit, pada periode sebesar Rp 172 miliar, dan sampai akhir tahun ditargetkan Rp 290 miliar. (nur/opi)



AYO MENABUNG: Heru Triharto (berdiri) saat peresmian bank mini di SMP Gema 45, Rabu (16/5).

# Gubernur Tetap Gandoli DBH Migas



BINTANG LIMA: Suasana Hotel Bumi long weekend, Kamis (17/5). Sejumlah tamu masih melakukan booking.

## Long Weekend Tak Pengaruhi Okupansi

SURABAYA-Momen *long weekend* tidak berpengaruh signifikan terhadap industri perhotelan di Kota Pahlawan. Baik hotel bintang tiga, empat maupun lima hanya mengalami kenaikan okupansi kisaran lima persen di akhir pekan panjang ini.

Sheraton Surabaya Hotel and Towers, misalnya. Okupansi hotel bintang lima di kawasan *central business district* (CBD) Tunjungan itu hanya mengalami kenaikan lima persen saja. "Long weekend kali ini kenaikan okupansi kita hanya sekitar lima persen," kata Ety Ariati Soraya, *Public Relation Manager* Sheraton Surabaya Hotel and Towers, Kamis (17/5).

Ety menjelaskan, kenaikan okupansi ketika *long weekend* tidak seberapa besar perbedaannya dengan *week days*. Penyebabnya, salah satunya karena masyarakat Surabaya memilih liburan ke luar kota. "Okupansi kami *long weekend* kali ini sekitar 80 persen sampai 90 persen berdasarkan reservasi yang sudah ada. Mengalami sedikit kenaikan dibandingkan hari biasa yang hanya sekitar 75 persen," lanjut lulusan FISIP Universitas Airlangga itu.

Hal senada dikatakan Ratih L Wardani, *Assistant Marketing Communication Manager* Hotel JW Marriott. Pada *long weekend* kali ini, peningkatan okupansi hotel yang juga berlokasi di CBD Tunjungan itu tidak

terlalu signifikan. "Pada saat *long weekend* kali ini di Surabaya cenderung sepi. Mungkin karena orang-orang lebih memilih liburan luar kota. Okupansi kami hanya sekitar 60 persen hingga 70 persen," jelas Ratih.

Seperti halnya bintang 5, di hotel-hotel bintang 3 dan 4 pun kenaikan okupansinya tidak terlalu besar. Sesuai pantauan Radar Surabaya, di hotel-hotel seperti Midtown, Mercure Grand Mirama dan Ibis Rajawali, peningkatan tamu pada *long weekend* kali ini tidak banyak, dan masih didominasi tamu dari dalam kota.

"Pada *long weekend* kali ini jumlah okupansi masih cukup baik. Sekitar 80 persen dari jumlah kamar hotel yang sudah operasional. Peningkatannya tidak seberapa dibandingkan dengan hari biasa, akan tetapi masih cukup bagus," terang Donny Manuarva, *General Manager* Midtown Hotel.

Sedangkan di Mercure Grand Mirama, kenaikan jumlah tamu hotel justru didominasi oleh keluarga. Dimana mereka memanfaatkan waktu libur untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati fasilitas hotel. "Pada *week days* okupansi kami antara 90 persen sampai 95 persen. Untuk *long weekend* kali ini okupansi kami naik menjadi 96 persen," jelas Tatok Hariyanto, *Public Relation Manager* Mercure Grand Mirama. (nur/opi)

## Tak Mau Ajukan PK

SURABAYA-Desakan untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 51/2011 tentang Penetapan Permendagri nomor 8/2007 tentang Provinsi Jatim sebagai Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Migas, ditanggapi dingin Gubernur Soekarwo. Orang nomor satu di Provinsi Jatim ini berdalih Mendagri tidak mengurus minyak dan gas (migas), sehingga soal PK tidak perlu ditanggapi. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu tetap mengklaim bahwa undang-dana bagi hasil (DBH) migas, sudah ada undang-undangnya sendiri.

Dikatakan Soekarwo, pihaknya akan melakukan persentasi tentang Jatim yang memiliki banyak SDA sektor migas. Presentasi direncanakan pada 13 Mei lalu, tapi gagal dilakukan karena peserta dari persentasi tersebut tidak lengkap sehingga diundur 21 Mei. "Tanggal 21 (Mei) baru persentasi di BP Migas, karena pada rencana awal belum lengkap semua. Karena itu harus ada dari Pertamina dan lembaga migas," kata Soekarwo.

Sekedar diketahui, sebelumnya kalangan DPRD Jatim mendesak Gubernur untuk segera melakukan PK atas Permendagri tersebut. Tapi, desakan itu tidak ditanggapi serius oleh Gubernur. Orang nomor satu provinsi Jatim ini menganggap Mendagri tidak memiliki urusan dengan migas. Kewenangan itu ada di Kementerian ESDM. "Kan Pak Mendagri nggak ngurus minyak dan gas. Itu kan (yang mengurus) Menteri ESDM," jawab dia.

Lepas dari itu, berdasarkan Permendagri nomor 51 tahun 2011, Pemprov Jatim tidak berhak menerima DBH. Kewenangan untuk

**Kan Pak Mendagri nggak ngurus minyak dan gas. Itu kan (yang mengurus) Menteri ESDM".**

**Soekarwo**

GUBERNUR JATIM

mengelola pun dikembalikan kepada daerah. Meski begitu, hingga kini Pemprov Jatim tetap mendapatkan DBH dan melakukan pengelolaan terhadap daerah-daerah penghasil migas, seperti di Sampang PSC (Santos), Madura Offshore PSC (Santos), Poleng TAC (Kodeco Energi), Bawean Blok PSC (Camar Resource Canada), dan Kangean PSC (EMP Kangean). "Undang-undang Bagi hasil kan ada. Malah ke depannya kita akan melakukan *golden share*," bebarnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jatim Nizar Zahro tetap menyatakan jika berdasarkan pada aturan Mendagri yang dikeluarkan, Pemprov Jatim tidak berhak untuk mendapatkan DBH. Jika ingin mendapatkan DBH, maka harus tetap melakukan PK terhadap Permendagri nomor 51/2011. "Semestinya tidak dapat. Kalau mau dapat harus mengajukan PK," ujar Nizar Zahro.

Karena tidak diatur secara tegas, politisi dari Fraksi PBR ini menemukan terjadi perbedaan data terkait DBH pengelolaan migas. Menurut data yang diperolehnya dari ESDM, per tahun Jatim hanya mendapatkan Rp 17 miliar. Akan tetapi, data dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, DBH SDA pagu Provinsi Jatim mencapai Rp 126 miliar lebih. "Akan kita selidiki sebetulnya SDA itu berasal dari apa saja. Biar *nggak jomplang* nilainya," ucap dia. (rou/opi)

## SAMBUNGAN DARI HALAMAN 5

### Kau Kukejar,...

Ini jelas peluang bagi para pengusaha dari negara Anda," kata Walikota Chao kepada saya. Selama ini, yang banyak memanfaatkan pertumbuhan tingkat ekonomi China ini baru negara-negara besar. Ia juga berharap Indonesia bisa memanfaatkan dengan meng-eksport barang-barang yang dibutuhkan rakyat China yang tambah makmur sekarang.

Kegigihan walikota Chao ini hanya sebagian contoh. Di kota lain di China, seorang bupati sampai memberikan pinjaman dana untuk pabrik yang mau bangkrut. Syaratnya, pemilik pabrik tersebut tidak boleh menutup pabriknya. Dengan suntikan dana tersebut, pabrik pun tak jadi bangkrut dan sehat

kembali. Karena pabrik tak jadi bangkrut, para pekerjanya pun menjadi terselamatkan. Sang bupati membantu pabrik tersebut agar warganya tetap mendapatkan pekerjaan.

Sudah cukup? Belum. Setelah pabrik itu sehat dan bisa mengembalikan dana pinjaman dari bupati, pabrik itu ternyata berkembang pesat. Ia berhasil mendongkrak produksi dan menanggung untung besar. Karena itu, pabrik itu menjadi salah satu pembayar pajak tertinggi di daerah. Melihat itu, bupati setempat memberi uang insentif sampai dua juta Yuan kepada direksi. Uang itu diberikan sebagai penghargaan karena berhasil menghidupkan kembali pabrik dan kembali bisa memberi pendapatan pajak kepada pemerintah.

Di sela-sela pertemuan di

Kuala Lumpur, pemerintah kota setempat melalui semacam BUMD-nya juga sedang menawarkan kerjasama dengan kelompok pengusaha dari Surabaya.

Mereka memiliki aset yang sangat strategis di tengah kota Kuala Lumpur. Mereka mengajak kerjasama dengan skema bagi hasil. Kelompok pengusaha Surabaya yang berinvestasi dalam bentuk dana dan keahlian, sedangkan mereka setor lahan. Mereka juga siap untuk membantu mengakses dana pinjaman ke perbankan Malaysia.

Tentu kita tidak bisa meniru mereka. Sebab, rata-rata pemerintah daerah belum kaya seperti kota dan kabupaten di China. Juga aturannya belum memungkinkan. Jangankan memberi insentif besar. Pejabat

pemerintah yang dekat dengan pengusaha saja dianggap berkolusi dan bisa menjadi bidikan KPK. Rakyat juga seringkali punya pikiran cekak. Bukan ingin menjaga bagaimana investor kerasan menanamkan uang di daerahnya. Seringkali mereka malah menolak investor luar karena dianggap menambah persaingan. Ini yang sering membuat kepala daerah salah tingkah.

Memang kita belum seperti di China. Tapi bahwa kepala daerah perlu punya visi memajukan ekonomi daerah, rasanya itu menjadi sebuah keharusan. Dan untuk itu diperlukan kerja barengan. Tidak mungkin sebuah daerah hanya mengandalkan APBD untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya. Padahal kita tahu, kekuatan APBD pemerintah daerah kita rata-rata

tidak lebih dari 5 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mereka. Ini berbeda dengan di China. Menurut Walikota Cao, di negaranya rata-rata APBD lebih dari 20 persen dari PDRB-nya.

Karena itu, peran swasta di Indonesia menjadi sangat penting. Sebab mereka lebih banyak memberikan sumbangan bagi pergerakan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Di Ponorogo misalnya. Menurut hitungan ekonomi, untuk bisa tumbuh ekonominya seperti di tingkat provinsi dibutuhkan uang beredar Rp 4 triliun. Saat ini, kekuatan daerah baru Rp 3 triliun, termasuk di dalamnya kekuatan APBD. Karena itu, masih dibutuhkan dana Rp 1 Triliun. Ini berarti masih perlu turun tangan kalangan swasta untuk menggenjot pertumbuhan

ekonomi Ponorogo.

Kita memang baru dua kali kepala daerah dipilih langsung. Kelak para kepala daerah pasti akan berlomba membuat prestasi ekonomi agar bisa tetap dipercaya para pemilihnya. Ke depan tidak hanya cukup kepala daerah yang baik hati, tapi juga yang bisa mengangkat daerahnya menjadi kebanggaan secara ekonomi.

Sebab, kalau ekonomi daerah maju, maka dengan sendirinya kesejahteraan warganya akan juga terangkat. Dan untuk itu, mereka harus membuat berbagai terobosan, termasuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada warganya yang menganggur, yang sudah bekerja, dan sektor swasta yang menciptakan lapangan kerja.

Saatnya pasti akan tiba!!!! (\*)

### Revitalisasi ...

Pada masa giling pertama ini akan menjadi awal untuk pembenahan manajemen di PG Candi dan pabrik-pabrik gula lainnya untuk kedepannya SDM bisa menjadi lebih baik. Sedangkan untuk revitalisasi peralatan dan mesin pabrik,

akan dilakukan pada periode giling keempat, atau sekitar 4 tahun lagi.

"Kita lihat dulu sejauh mana perkembangan dari pembenahan dan keterbukaan manajemen ini dulu. Dimana dengan dimulai dengan hal ini, target rendemen di sini yang dari 7,3 naik menjadi 8 bisa tercapai, baru kita akan mulai pemben-

han di sektor lainnya," papar Dahlan.

Kedepannya Dahlan menginginkan, PG Candi dan perusahaan lainnya milik negara dapat meningkatkan dan memperbaiki kinerjanya sehingga dapat mendukung sumbangan devisa terhadap negara dan mendukung pertumbuhan ekonominya.

Menurutnya, kecenderungan penurunan inflasi dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan momentum yang tepat untuk terus diarahkan pada sasaran jangka menengahnya sebesar empat persen.

Penurunan inflasi tak lepas dari terkendalinya inflasi inti

"Bukan hanya di pabrik gula ini saja, tapi keseluruhan BUMN yang ada untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar semakin menyejahterakan rakyat. Dan saya akan selalu mendukung dan berusaha untuk memberikan solusi dan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang harus diselesaikan," pungkask Dahlan. (nur/hen)

yang didukung oleh keberhasilan dalam pengelolaan stabilitas makro. Sebagaimana tercermin dalam kondisi moneter dan fiskal yang terjaga dengan baik, sehingga mampu menggerakkan ekspektasi inflasi pada tingkat yang cukup rendah. (mna/hen)

seperti Hero Super Market, J Co, Ice Club, XXI.

"Sebentar lagi ada *anchor tenant* yang masuk kesini dengan space cukup besar," kata Tessa meyakinkan. (fix/hen)

### Pemerintah-BI ...

"Sesuai dengan UU yang berlaku dalam penetapan sasaran inflasi tersebut, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan BI," imbuhnya.

Penetapan sasaran inflasi

merupakan komitmen kuat dari pemerintah dan BI untuk menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi melalui penurunan tingkat inflasi nasional secara bertahap dalam jangka menengah-panjang.

### Lenmarc Gencar ...

Tinggal menunggu kecocokan harga saja. Dept Store tersebut akan menjadi yang pertama di

Indonesia. "Nanti saja. Yang jelas masih dari Asia," ujarnya.

*Full occupancy* akan tercapai secepatnya. Dari total space 48.000 meter persegi sudah tersewa 60 persen.

Diharapkan akhir tahun nanti sudah 85 persen. Dari jumlah tersebut sekitar 35 persen merupakan *tenant* asing dan sisanya *tenant* Indonesia dengan *brand* yang cukup terkenal

### Beri Contoh ...

Meski medan ke Kalitengah cukup berat, dia juga datang lebih awal. Padahal jalan ke Kalitengah bergelombang, dan sebagian rusak.

Namun ketika menyerahkan santunan pada Zemil Septiono, anak pasangan Soladi dan Suryati yang kini duduk di kelas VII SMP Taruna Jaya Kedungcawek

### Kontes Dongkrak...

"Meski masih ada hambatan pasokan suku cadang akibat banjir di Thailand, kami optimistis target itu akan tercapai," kata Rudy.

Pada 2012 ini, sampai akhir April *share*-nya sudah mencapai 25 persen. Penjualan terus meningkat dan diperkirakan akan melebihi tahun 2011.

Honda Jazz, lanjut Rudy, memang paling mudah untuk dimodifikasi. Baik itu yang generasi pertama atau kedua. Untuk kontes kali peserta modifikasi

harus menggunakan yang generasi kedua keluaran Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM).

Menurut Rudy, kontes modifikasi ini berpengaruh signifikan untuk meningkatkan penjualan. Juga untuk mencari masukan untuk varian baru yang akan diproduksi beberapa tahun mendatang. Dengan kontes ini penggemar mobil modifikasi yang belum menggunakan Honda Jazz, diharapkan beralih ke Honda Jazz. Begitu juga masyarakat yang memilih Honda Jazz karena mudah dimodifikasi. (za/hen)